

Model Top Down Dari Bottom Up Dalam Perencanaan Pariwisata

Oleh : Ari Setyastuti *)

A. Pendahuluan.

Perencanaan Pariwisata yang dibangun di atas logika linier dan sentralistik (*top down*) tidak lagi relevan dengan situasi sekarang. Ketidak sesuaian tersebut selain disebabkan karena ternyata hasil pembangunan pariwisata selama ini telah jauh dari yang di harapkan, juga tidak sesuai lagi isu nasional tentang demokrasi, maupun isu internasional tentang pembangunan pariwisata berkelanjutan yang berbasis komunitas (*community-based tourism development*).

Selama ini perencanaan pariwisata selalu dilakukan oleh pemerintah tanpa melibatkan peran dan partisipasi masyarakat. Akibat banyak rencana pembangunan pariwisata yang pada saat akan direalisasikan ternyata mendapat penolakan dan protes keras dari masyarakat, sehingga proses perencanaan yang telah menghabiskan waktu, tenaga dan pikiran serta biaya yang tidak sedikit, tidak dapat dilaksanakan. Beberapa contoh kasus tersebut antara lain kasus fenomenal Mega Proyek Parangtritis,

Proyek Pasar Seni Jagad Jawa dan Proyek Shopping Street di Borobudur. Beberapa contoh kasus tersebut menggambarkan betapa masyarakat merasa diperlakukan tidak adil dan termarginalisasi baik secara sosial, budaya, politik, ekonomi, maupun dalam pengelolaan lingkungan yang mempengaruhi kehidupannya. Selama ini masyarakat hanya diperlukan sebagai obyek pembangunan untuk mendukung target-target ekonomis pemerintah semata. Model perencanaan yang sentralistik (*top down*) tersebut semakin tidak populer jika dikaitkan dengan isu nasional dimasa reformasi saat ini, dimana masyarakat menuntut demokratisasi di segala bidang.

Gerakan reformasi menuntut terjadinya devolusi kekuasaan negara dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dan dari kelompok elit kepada masyarakat, sebagai syarat paling esensial bagi berjalannya proses demokratisasi di dalam penyelenggaraan

*) Tenaga Konsultan & STUPA Indonesia

pemerintah pada semua tataran. Sementara itu dinamika perkembangan pariwisata internasional telah mengalami pergeseran dari *high-volume production of standard commodities* menuju *high-volume production of unuque commodities*. Untuk mengantisipasi pergeseran trend pariwisata global tersebut, dituntut keterlibatan masyarakat lokal dalam mewujudkannya. Pergeseran tersebut mendorong terjadinya dialog diantara kekuatan-kekuatan global (*multinational corporation*), nasional (*national corporation*), dan lokan (pengusaha lokal) semakin terbuka lebar. Dalam kerangka itu semua, maka sudah saatnya system perencanaan yang sentralistik (*top down*) harus diganti dengan system yang dapat lebih mengakomodasikan semua kepentingan *stakeholder* pembangunan pariwisata. Dengan demikian dapat dicapai apa yang menjadi tuntutan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan.

B. Paradigma Pembangunan Pariwisata yang Berkelanjutan

Pembangunan pariwisata yang berkelanjutan didefinisikan sebagai pembanguan pariwisata yang memenuhi kebutuhan wisatawan dan masyarakat lokal pada masa sekarang sambil menjaga dan memperluas kesempatan untuk masa yang akan datang. Dengan pengelolaan yang tepat, kebutuhan ekonomi, sosial dan estetis dapat dipenuhi sambil menjaga integritas budaya, proses ekologi yang essensial,

keanekaragaman hayati, dan sistem-sistem yang menunjang kehidupan (WTO, 1998)

Untuk dapat menerapkan konsep pembangunan pariwisata yang berkelanjutan, perlu dilakukan upaya-upaya yang menyeluruh dan terpadu, baik dari pihak pemerintah, swasta, dan masyarakat.

Salah satu kunci keberhasilan pembangunan ini adalah peran serta masyarakat setempat dalam gerak roda industri pariwisata tersebut. Masyarakat perlu diperdayakan dalam segala aspek untuk dapat menjadi subyek dari pengelolaan industri pariwisata, karena pada kenyataannya masyarakat lokal memiliki peran sangat besar dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan. Dalam konteks ini dapat dikatakan bahwa konsep pembanguan berkelanjutan hanya dapat dicapai dengan menerapkan apa yang disebut sebagai pembangunan pariwisata berbasis komonitas (*community-based tourism development*). Syarat paling essensial di dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan yang berbasis komonitas adalah bahwa inisiatif dan penyelenggaraannya tidak boleh dipaksakan oleh alasan dan motif-motif serta kepentingan-kepentingan yang datang dari luar. Sebaliknya, pembangunan harus dilakukan atas inisiatif dan dorongan kepentingan masyarakat, dan masyarakat harus diberi kesempatan

untuk terlibat di dalam keseluruhan proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunannya, termasuk pemilikan dan penguasaan asset dan infrastrukturnya. Dengan demikian distribusi keuntungan akan diterima masyarakat secara lebih adil. (Nasikun, 2000)

Dengan demikian partisipasi masyarakat di dalam pengendalian operasinya merupakan jaminan keberkelanjutan (ekonomi, social, kultur, politik, ekologi) dari pembangunan pariwisata berbasis komunitas. Dalam posisinya sebagai subyek dari pembangunan tersebut, masyarakat harus berdayaguna agar dapat melaksanakan setiap tahapan pembangunan tersebut.

C. Model Bottom Up Dalam Perencanaan Pariwisata.

Belajar dari berbagai kasus kegagalan perencanaan pariwisata di tanah air, kasus Pelestarian dan Pengembangan Kawasan Pusaka Jeron Beteng, khususnya perencanaan untuk Tamansari dapat dijadikan contoh perencanaan dengan model Bottom Up yang melibatkan masyarakat secara total. Laretna T Adishakti dalam papernya yang disampaikan dalam seminar "Kebijakan Pelestarian Pusaka Budaya". menekankan beberapa prinsip penting dalam pelestarian, pengembangan dan pengelolaan yaitu :

1. Dari kegiatan kepelestarian fisik :

Perlunya pemahaman pelestarian yang mengakar dan menyeluruh sebelum

menjangkau persoalan pelestarian fisik lingkungan .

2. Proses Bola Salju : Pelaksanaan dimulai dari ruang lingkup kecil dengan persoalan yang sederhana menuju kegiatan dengan ruang lingkup yang lebih luas, dan persoalan yang kompleks dan membutuhkan kolaborasi inter disipliner dan lintas sektoral.

3. *People centered management*, : Masyarakat tidak hanya diberi kesempatan untuk terlibat, namun justru diarahkan untuk mengelola kegiatan agar terjadi kesinambungan ketika program pendampingan berakhir. Masyarakat merupakan pendukung, penasehat atau penyandang dana dalam waktu yang terbatas. Kesinambungan kegiatan selanjutnya sepenuhnya tergantung pada pengelolaan yang berpusat pada masyarakat lokal.

Berdasarkan beberapa prinsip itu dilakukan 6 program pendekatan pemecahan persoalan secara paralel maupun bergantian dalam rentang waktu yang relatif panjang untuk menyelesaikan seluruh persoalan secara tuntas dan berkesinambungan. Program pendekatan meliputi : Organisasi dan pengelolaan, Dokumentasi dan prestasi, Promosi, Perencanaan Kegiatan, Design, Restrukturisasi Ekonomi. Sedangkan strategi

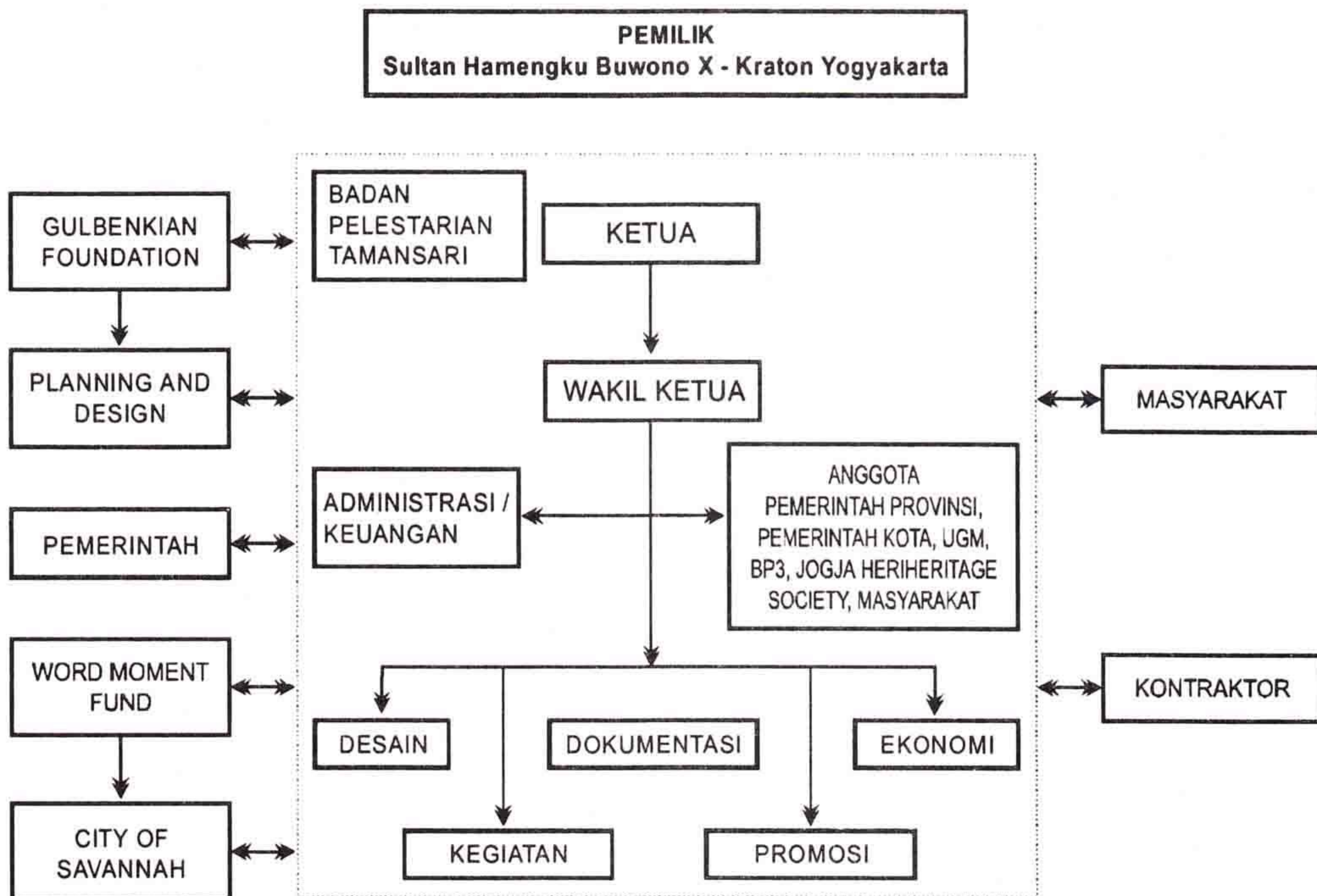
keberhasilan meliputi : Pasar, Lokasi, Design, Keuangan, Kewirausahaan, pemasaran. Proses dan Program Pelestarian

1. Dokumentasi dan Presentasi

Identifikasi dan pendataan merupakan langkah awal dari program pelestarian ini yang dimulai tahun 2002. tahap ini dilakukan oleh Pusat Studi Lingkungan Hidup UGM dan Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala DIY. Keseluruhan proses pelestarian akan dipublikasikan dalam bentuk buku oleh Jogja Heritage Society.

2. Organisasi dan Pengelolaan dibentuk Badan Pelestarian tamansari Kraton Yogyakarta yang ditetapkan atas perintah Sultan Hamengku Buwono X. badan ini melibatkan Universitas Gajah Mada, Pemda DIY dan kota Yogyakarta, Kraton Yogyakarta, balai Pelestarian Peninggalan Purbakala DIY, Jogja Heritage Society (JHS) dan masyarakat setempat.

Adapun Bagan dan pengelola adalah sebagai berikut :



3. Promosi

Setiap tahap kegiatan pelestarian selain dipublikasikan melalui media masa secara intensif juga diselenggarakan berbagai sarasehan dengan mengundang masyarakat luas untuk meminta masukan untuk dalam perencanaan maupun pengelolaan pelestarian. Dengan upaya ini diharapkan masyarakat setempat maupun umum semakin meningkatkan rasa memilikinya karena selalu dilibatkan dan berbagai usulan dari mereka dipertimbangkan. Promosi juga dimaksudkan untuk mengundang partisipasi dan kolaborasi berbagai pihak untuk melakukan aksi nyata dalam berbagai program.

4. Disain Kegiatan

Pelestarian Tamansari tidak akan berhenti pada penyelesaian fisik. Sedang dipersiapkan kegiatan budaya yang akan menjadi Jiwa Tamansari dan melibatkan masyarakat setempat. Pertalian panjang berbagai budaya di peninggalan Tamansari ini terus akan di abadikan melalui pertunjukan seni. Serangkaian koreografi arsitektural dipersiapkan dengan melibatkan masyarakat setempat di antaranya "Tamansari Mangsa Ketiga" dan musik keroncong.

Disamping itu tradisi membatik yang masih membudaya dilingkungan masyarakat Tamansari tetap ditumbuh kembangkan sebagai atraksi dan souvenir yang menarik bagi wisatawan. Bahkan tradisi ini telah mampu menarik wisatawan untuk memperpanjang masa tinggal dengan mengikuti kursus yang diselenggarakan masyarakat lokal.

5. Disain Fisik dan Lingkungan

Berdasarkan identifikasi dan dokumentasi yang dilakukan disusun proses selanjutnya sebagai berikut :

- a. Perencanaan Fungsi & Rencana Pribadi
- b. Disusun Detail Engineering Design
- c. Eskavasi
- d. Pemilihan Kontraktor
- e. Pelaksanaan Konstruksi dan Perbaikan
- f. Pengelolaan Proyek

6. Retrukturisasi Ekonomi

Sedang dipersiapkan pengembangan ekonomi untuk tamansari dengan memperhatikan :

- Analisis Pasar & Strategi Pengembangan Ekonomi
- Pengembangan Bisnis Wisata Budaya
- Pencangkakan Citra Tempat yang baru untuk Tamansari

Seluruh kegiatan perencanaan dan implementasi program dilakukan secara

terintegrasi dan komprehensif yang melibatkan berbagai disiplin ilmu yang terkait dan kolaborasi lintas sektoral. Seluruh stakeholder baik dari komponen masyarakat, pemerintah maupun swasta terlibat dalam seluruh proses pelestarian dan pengelolaan proyek. Pendanaan proyek berasal dari pemerintah pusat (BP3DIY), Pemda (Propinsi) serta bantuan dari Gulbenkian Foundation dan City of Savannah.

Pendamping untuk pengembangan untuk atraksi dilakukan dengan kolaborasi dengan seniman dan budayawan di DIY serta berbagai lembaga terkait.

REFERENSI

Adishakti, Laretna T., 2003, Community Participation and Future Development of Borobudur Temple and its Enviroment, Paper presented in the Fourth International Experts Meeting on Borobudur, Organized by Ministry of Culture and Tourism in Collaboration with UNESCO in Borobudur, Magelng, 4-8 July 2003.

Adishakti, Laretna T., 2003, Pelestarian Pusaka Budaya : Masyarakat Sebagai Pusat Pengelolaan Perubahan Makalah, Makalah disampaikan dalam Pra kongres kebudayaan pada tanggal 28-30 April 2003 di Denpasar, Bali.

Adishakti, Laretna T., 2004, Pelestarian tamansari dan Kawasan Pusaka Njeron Beteng Kraton Yogyakarta, Paper dalam Seminar “ Kebijakan Pelestarian Pusaka Budaya: kasus di Indonesia dan Perancis “ , diselenggarakan oleh Pusat Kebudayaan Perancis , Tanggal 11 Mei 2004 di Surabaya.

Anonim, 1998, Guide for Local Authorities on Developing Sustainable Tourism, a Tourism and Everonment Publication, Word Tourism Organization.

Kusworo, Hendrie Adji, 2000, Pengembangan Wisata Pedesaan Tepi Hutan Berbasis Kerakyatan, Pengusahaan Ekowisata, Yogyakarta : fakultas Kehutanan UGM.

Kusworo, Hendrie Adji, 2002, Perencanaan Pariwisata, Makalah dalam Kegiatan Peningkatan Kemampuan Teknis Operasioanal Aparat Dinas kebudayaan dan Pariwisata Propinsi dan Kabupaten / Kota Yogyakarta di Hotel Phoenix Yogyakarta.

Kusworo, Hendrie Adji, 2003, Enhancing The Rule of community in Tourism Destination: Community and Institutional Development Perspective (Indonesia Case Studies), makalah yang disampaikan pada ; 2003 Asian Uninet Workshop Location and Atractiveness Studies in Tourism : Supporting Tools for Tourism Policies, Bangkok Thailand 1-3 Desember 2003.

Lindberg, Kreg & Hawkins, Donald E, 1995, Ecotourism: A Guide for Planners and Managers, The Ecotourism Society, North Bennington, Vermont.

Nasikun, Globalisasi dan Paradigma Baru pembangunan Pariwisata Berbasis Komunitas, Pengusahaan Ekowisata, Yogyakarta : fakultas Kehutanan UGM.

Swarbrooke, Joh, 2002, Sustainable Tourism Management, Cabi Publishing, London.

Biodata Penulis

Penulis lahir di Boyolali, pada tanggal 11 Nopember 1961, lulus Sarjana Sastra Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Jurusan Arkeologi.

Pada saat ini sedang menempuh pendidikan Magister Kajian Pariwisata Pasca Sarjana UGM.

Adapun pekerjaan sebagai Ketua Unit Candi Prambanan BP3 DIY, sebagai tenaga konsultan di STUPA Indonesia.